



Kemendikdasmen
Balai GTK Provinsi Maluku

LAPORAN KINERJA 2025

Balai GTK Provinsi Maluku



Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku
Jalan Tihu Wailala, Rumah Tiga, Teluk Ambon, Ambon, 97234
www.kemendikdasmen.go.id



Laporan Kinerja (LAKIN) BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya BGTK Provinsi Maluku berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja BGTK Provinsi Maluku ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja BGTK Provinsi Maluku tahun 2025 mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Dalam Laporan Kinerja BGTK Provinsi Maluku ini tersaji informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BGTK Provinsi Maluku tahun 2025 disertai analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja BGTK Provinsi Maluku. Harapan kami, Laporan Kinerja BGTK Provinsi Maluku dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja organisasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan layanan dan kinerja di tahun berikutnya.

Akhirnya semoga laporan kinerja BGTK Provinsi Maluku bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Ambon, Januari 2026
Kepala

Dr. La Mansur SPd MPd
NIP. 197501172001121001

Daftar Isi

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	
A Latar Belakang	1
B Dasar Hukum	2
C Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	3
D Isu-Isu Strategis/ Permasalahan	4
BAB II Perencanaan Kinerja	
A Rencana Strategis	6
B Rencana Kerja dan Anggaran	7
C Perjanjian Kinerja	9
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
A Akuntabilitas Kinerja	12
B Realisasi Anggaran	25
C Kinerja Lain-Lain	27
BAB IV Penutup	33
Lampiran-Lampiran	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Balai GTK Provinsi Maluku tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Balai 2025-2029 sebagai fondasi penting bagi penguatan tata kelola organisasi dan percepatan pencapaian terhadap 2 (Dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 3 (tiga) indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan (SK.1) dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran (IKK.1.) dan Meningkatnya tata kelola Balai GTK Maluku (SK 2) dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik (IKK 2.1) dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A (IKK 2.2) sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Balai tahun 2025

Tingkat kinerja Balai GTK Provinsi Maluku tahun 2025 berdasarkan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK) telah dapat terpenuhi dan ada yang melebihi target yang ditetapkan, dengan tingkat penggunaan anggaran sebesar Rp 14,624,267,58 atau 68,29% dari total pagu sebesar Rp 22.749.645.000. Hasil ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Pencapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Berikut ringkasan capaian kinerja BGTK Provinsi Maluku pada tahun 2025.



Upaya pencapaian target kinerja Balai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2025, masih terdapat sejumlah permasalahan dan kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Perubahan kebijakan, baik yang bersifat kelembagaan terkait penyesuaian administrasi akibat perubahan nomenklatur lembaga maupun kebijakan implementasi dan mekanisme program kegiatan dari pusat, mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, terutama pada Semester pertama. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya ritme pelaksanaan program dan memerlukan penguatan koordinasi internal dan eksternal.
2. Kebijakan efisiensi belanja, pembatasan serta blokir anggaran, dan penataan pemanfaatan PNBK membatasi fleksibilitas pengelolaan anggaran, sehingga berdampak pada optimalisasi realisasi kegiatan di tingkat Balai.
3. Penyesuaian perencanaan dan penganggaran yang masih belum optimal termasuk adanya deviasi terhadap Halaman III DIPA, menyebabkan ketidaksinkronan antara realisasi anggaran dan capaian output kegiatan, serta berdampak pada pemenuhan indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
4. Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang lebih terkonsentrasi pada semester akhir mengakibatkan penyerapan anggaran belum merata sepanjang tahun berjalan, sehingga berdampak pada capaian output pertriwulan dan memengaruhi nilai kinerja anggaran
5. Penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Balai dengan Renstra Kemendikdasmen dan Renstra Ditjen GTK PG masih perlu diperkuat. Selain itu, pemahaman terhadap komponen SAKIP, pelaksanaan pengukuran kinerja dan pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi memerlukan penguatan koordinasi, sistem pendukung, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Balai..

Dalam rangka merespons berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi tersebut, Balai GTK Provinsi Maluku telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Penguatan Koordinasi Kebijakan, Implementasi Program, dan Kemitraan Strategis dengan unit pusat, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan strategis guna pembukaan blokir anggaran, serta penyelarasan kebijakan, mekanisme, dalam pelaksanaan program kegiatan maupun penguatan peranan lintas fungsi kelembagaan. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki ritme implementasi kegiatan, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, dan meningkatkan partisipasi dan peranserta pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan.
2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran diperkuat melalui penataan ulang perencanaan kerja, revisi DIPA, pembukaan blokir anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan PNBK sesuai ketentuan. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan anggaran,

menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan, serta mendorong pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun anggaran berjalan.

3. Penguatan Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, dan capaian Kinerja melalui pengendalian deviasi Halaman III DIPA, koordinasi intensif dengan instansi terkait, serta monitoring berkala terhadap keterkaitan realisasi anggaran dan capaian output. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan antara belanja dan hasil kegiatan serta pemenuhan indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
4. Penguatan Tata Kelola Kinerja dan Implementasi SAKIP dengan penyelarasan Renstra Balai dengan Renstra Kemendikdasmen dan Renstra Ditjen GTK PG melalui penajaman sasaran strategis, indikator kinerja, dan komponen terkait lainnya. Selain itu, pemahaman dan implementasi komponen SAKIP diperkuat melalui penguatan pengukuran kinerja, integrasi data kinerja, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi secara sistematis guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja organisasi.
5. Penguatan Kapasitas SDM dan Sistem Pendukung Kinerja melalui konsolidasi internal, pengembangan dan penguatan tim kerja tingkat balai serta pemanfaatan media dan aplikasi pendukung pelaporan kinerja.. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, akurasi data kinerja, serta keberlanjutan peningkatan kinerja balai.

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Pembangunan pendidikan nasional periode 2025–2029 merupakan bagian dari strategi nasional dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Kebijakan pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan tata kelola pendidikan, serta peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan sebagai pilar utama pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dengan penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebagai faktor kunci peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah.

Dalam kerangka tersebut, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibentuk pada pertengahan tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Balai GTK Provinsi Maluku dibawah binaan Dirjen GTK PG Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan melalui penyelenggaraan layanan peningkatan kompetensi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, struktur organisasi BGTK Provinsi Maluku, terdiri dari unsur Kepala Balai, Kasubag Umum, Tenaga Pelaksana dan Fungsional dengan ketersediaan sumber daya manusia sebanyak 43 orang dengan status PNS sejumlah 32 orang, PPPK sejumlah 7 orang, PPPK paruh waktu sejumlah 3 orang, dan PPNP sejumlah 1 orang dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SMP hingga Strata. Seluruh unsur bekerja secara sinergis dalam rangka mencapai sasaran strategis Renstra 2025–2029, khususnya terkait peningkatan mutu layanan pendidikan, efektivitas tata kelola, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai wilayah kerja balai di Provinsi Maluku.

Dari sisi administratif, Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota, yakni Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan georafis wilayah kepulauan dimana lebih dari 98 persen berupa lautan dan terdiri atas lebih dari seribu pulau besar maupun kecil, sehingga menghadirkan tantangan signifikan dalam pemerataan layanan pendidikan, khususnya untuk menjangkau para guru dan tenaga Kependidikan yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan terdepan.

Kondisi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku menunjukkan keragaman, diantara distribusi yang belum merata, akses terbatas terhadap pengembangan profesional, perbedaan kualifikasi akademik, variasi kompetensi pedagogik, serta penguasaan teknologi pembelajaran yang belum merata antarwilayah. Selain itu, keterbatasan akses transportasi, infrastruktur pendidikan yang belum merata, serta perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat turut memengaruhi kualitas layanan pendidikan. Kondisi tersebut menuntut strategi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang adaptif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, guna mendukung pemerataan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh Provinsi Maluku.

Seiring dengan kompleksitas tantangan geografis, keterbatasan akses, serta disparitas ketersediaan dan kompetensi GTK antar wilayah, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Balai GTK Provinsi Maluku. Penerapan SAKIP mendukung pelaksanaan fungsi strategis Balai GTK mulai dari pemetaan kompetensi GTK, pengembangan model peningkatan kompetensi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hingga supervisi dan pemantauan pelaksanaan program di daerah. Fungsi-fungsi tersebut memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan pemerataan guru, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan kapasitas satuan pendidikan di wilayah kepulauan.

Berbagai upaya telah dilakukan selama tahun 2025 untuk mendukung fungsi strategis tersebut melalui Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku namun belum sepenuhnya beum dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terkait keterbatasan pemanfaatan teknologi dan literasi digital dan disparitas kompetensi antar wilayah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2025, sebagai tahun pertama implementasi Renstra 2025–2029, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran sekaligus sarana evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta menjadi dasar bagi evaluasi, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program pada tahun berikutnya selama periode Renstra balai. Dengan demikian, LAKIN diharapkan menjadi instrumen pengendalian dan peningkatan kinerja kelembagaan yang berkelanjutan, sekaligus mendukung pemerataan serta peningkatan mutu layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

B. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
- e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
- m. DIPA BGTK Provinsi Maluku Nomor: SP DIPA-138.03.2.693357/2025 tertanggal 02 Desember 2024.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas

BGTK Provinsi Maluku melaksanakan tugas sesuai mandat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan

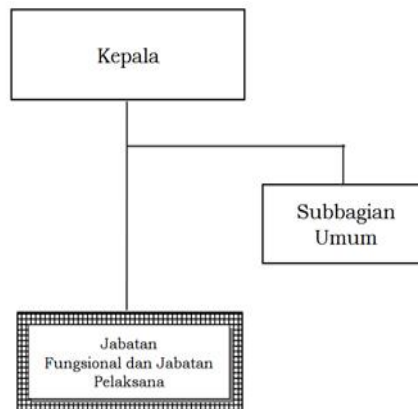
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BGTK Provinsi Maluku melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- b. Pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- c. Pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- f. Pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- h. Pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- i. Pelaksanaan urusan administrasi.

Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BGTK Provinsi Maluku

D. Isu-Isu Strategis / Permasalahan

Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan pendidikan dalam pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku, masih dihadapi sejumlah isu strategis /permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terarah. Isu-isu strategis/permasalahan tersebut antara lain :

1. Ketimpangan kualifikasi, kompetensi, dan distribusi guru serta tenaga kependidikan berdampak pada keterbatasan pemerataan layanan pendidikan dan mutu pembelajaran antarwilayah dengan karakteristik kepulauan.
2. Kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan pembelajaran kontekstual masih belum optimal, terutama dalam menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada tingkat satuan pendidikan.
3. Kesenjangan capaian literasi, numerasi, dan penguatan karakter peserta didik antarwilayah mencerminkan belum meratanya kualitas proses dan hasil pembelajaran.
4. Pengembangan kompetensi guru belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan aktual berbasis data dan dinamika transformasi pendidikan, sehingga daya dukung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran masih terbatas.
5. Dukungan terhadap pemanfaatan teknologi pembelajaran, peningkatan literasi digital guru, serta efektivitas manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan masih belum optimal dalam mewujudkan layanan pembelajaran bermutu.

6. Keterbatasan dukungan sumber daya fungsional maupun pelaksana yang profesional dan kompeten, baik dari sisi jumlah maupun optimalisasi peran dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, masih menjadi tantangan dalam optimalisasi layanan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan..

Dalam rangka menjawab isu-isu strategis/permasalahan pengembangan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku, maka BGTK Provinsi Maluku menjalankan peran strategis yang terintegrasi dengan tugas dan fungsi balai sesuai ketentuan regulasi kelembagaan, sebagai berikut :

1. Fasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan dengan berbagai program pengembangan kompetensi dan layanan akselerasi peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan layanan pendidikan.
2. Penguatan kapasitas guru dan pendampingan implementasi kurikulum dan pembelajaran kontekstual sesuai kebutuhan karakteristik peserta didik melalui fasilitasi pemahaman kebijakan kurikulum, pengembangan perangkat ajar, serta pendampingan praktik pembelajaran di tingkat satuan pendidikan.
3. Pengembangan kompetensi guru sesuai kebutuhan aktual berbasis data serta dinamika transformasi pendidikan melalui pemetaan kebutuhan kompetensi, penyesuaian materi pengembangan kompetensi, serta penguatan pelatihan berkelanjutan bagi guru.
4. Peningkatan literasi digital guru dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran melalui pelatihan penggunaan platform pembelajaran digital, penguatan kemampuan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK, serta pendampingan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.
5. Penguatan kemampuan guru dalam literasi, numerasi, dan penguatan karakter peserta didik dengan pengembangan kompetensi pembelajaran berbasis asesmen, penguatan praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik, serta penguatan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran.
6. Penguatan manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan melalui penguatan kepemimpinan kepala sekolah dan pengautan peran pengawas sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan.
7. Penguatan kapasitas SDM kelembagaan dan mutu layanan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi tenaga fungsional Widyaiswara dan Pranata Teknologi Pembelajaran, penguatan koordinasi dan kolaborasi, serta pemanfaatan jejaring kemitraan dalam mendukung kualitas layanan lembaga

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra), BGTK Provinsi Maluku merupakan arah kebijakan dan dasar penyelenggaraan program serta kegiatan selama periode 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran program/sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan serta prioritas program yang menjadi pedoman dalam menetapkan target kinerja tahunan, termasuk target pada tahun 2025.. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra BGTK Provinsi Maluku memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh target kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 merujuk pada indikator dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BGTK Provinsi Maluku, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Visi BGTK Provinsi Maluku 2025-2029 :

“ Terwujudnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang kompeten, profesional, berkarakter, dan adaptif berbasis kearifan lokal untuk mendukung pendidikan yang bermutu dan berkeadilan di seluruh wilayah Maluku”

Misi BGTK Provinsi Maluku 2025-2029 :

1. Melaksanakan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
2. Mengembangkan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
3. Mengembangkan media pembelajaran bagi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
4. Melaksanakan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
5. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
6. Melaksanakan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan serta pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
8. Melaksanakan kemitraan dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; serta
9. Melaksanakan urusan administrasi kelembagaan secara efektif dan akuntabel.

Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan pedoman utama balai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel pada tingkat balai.

Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Penguatan mutu layanan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus dan kesetaraan	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
Peningkatan sistem tata kelola Balai yang partisipatif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A

Matriks Kinerja

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ,pada tingkat Balai, maka disusun target kinerja 5 (lima) tahunan yang tertuang sebagaimana tertuang Renstra BGTK Provinsi Maluku 2025-2029. Dalam Matriks Kinerja menggambarkan target capaian yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tingkat balai selama kurun waktu yang telah ditetapkan masa periode renstra balai

Tabel 2.1 Matriks Kinerja BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025-2029

Program / Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
138.03. DI – Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					
Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan					
IKK.1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1,63 %	1,75 %	1,88 %	2,02 %	2,17 %
138.03.WA – Program Dukungan Manajemen Kegiatan					
Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatkan tata kelola Balai GTK Maluku					
IKK. 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK.2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A	A	A	A	A	A

Sumber : Renstra BGTK Prov Maluku 2025-2029

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Balai GTK Provinsi Maluku sebagai Pengguna Anggaran menyusun rencana kerja untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2025–2029. Pada

Tahun Anggaran 2025, Balai GTK Provinsi Maluku memperoleh alokasi anggaran dengan pagu awal sebesar Rp 23.381.080.000 dan pagu akhir sebesar Rp22.749.645.000.

Pada Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran ditetapkan sesuai pagu anggaran sebesar Rp.24.160.663.000. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk Tahun 2027 sampai dengan Tahun 2029 merupakan proyeksi kebutuhan anggaran yang disusun berdasarkan perkiraan pelaksanaan program dan kegiatan Balai GTK Provinsi Maluku dengan perkiraan kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya namun pada prinsipnya, alokasi tersebut akan disesuaikan setiap tahun anggaran berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan bagi Balai GTK Provinsi Maluku.

Tabel 2.2 Alokasi PAGU Anggaran BGTK Provinsi Maluku
Tahun 2025-2029

PAGU Anggaran	Alokasi Anggaran Renstra 2025-2029 (Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Awal	23.381.080.000	24.160.663.000	26.576.729.300	29.234.402.230	32.157.842.453
Akhir	22.749.645.000	-	-	-	-

Alokasi anggaran tersedia pada dasarnya untuk membiayai pengembangan Rencana kerja balai setiap tahunnya yang disusun berdasarkan Rencana Strategis balai. Rencana Kerja atau kinerja Tahunan (RKT) BGP Maluku Tahun 2025. Pada tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra Balai untuk lima tahun berikutnya, maka RKT yang disusun pada tahun 2024 (Masih BGP Prov.Maluku) merupakan PAGU Indikatif yang tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan Dirjen GTKPG Kemendikdasmen sehingga baik Target dan rencana anggaran tentunya dilakukan penyesuaian agar terjadi penyelarasan dan sinkron dengan Dirjen GTK PG. Berikut ini adalah Rencana kinerja BGTK Povinsi Maluku tahun 2025.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (SK) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Alokasi Pagu Indikatif (Rp)
SK1.	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan		18.669.131.000
IKK1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	2.176 Orang	6.195.967.000
IKK 1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	6.019 Orang	9.879.758.000
IKK 1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	271 Orang	2.593.406.000
SK 2	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Maluku		6.520.445.000
IKK 2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Maluku	Predikat A	160.084.000
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal	Nilai 92	6.360.361.000
Total Anggaran			25.189.576.000

Sumber : RKT BGTK Maluku 2025.

Sejalan dengan kebijakan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun pada Dirjen GTK PG maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BGTK Provinis Maluku Tahun 2025,

maka terjadi penyesuaian terhadap Rencana Kinerja Tahunan Balai pada tahun 2025 dengan perubahan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target Kinerja dan alokasi anggaran. Berikut ini disajikan RKT BGTK Provinsi Maluku tahun 2025 sesuai penyesuaian terhadap kebijakan Dirjen GTK PG Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kinerja (Penyesuaian) BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (SK) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Alokasi Anggaran (Rp)
SK1.	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan		18.669.131.000
IKK1.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1,63 %	18.669.131.000
SK 2	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku		4.711.949.000
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	Sangat Baik	160.084.000
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A	A	4.551.865.000
Total Anggaran			23.381.080.000

C. Perjanjian Kinerja

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis Kemendikdasmen yang berada di bawah Dirjen GTK PG menetapkan sasaran, indikator, dan target kinerja yang termuat dalam Renstra Balai tahun 2025-2029 dan menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja setiap tahunnya, sebagai berikut :

Tabel 2.5 Matriks sasaran, indikator, dan target kinerja Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan (SK) /Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025		2026		2027		2028		2029	
		PK	Renstra	PK	Renstra	PK	Renstra	PK	Renstra	PK	Renstra
SK1.Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan											
IKK 1.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1,63 %	1,63 %	1,75 %	1,75 %	1,88 %	1,88 %	2,02 %	2,02 %	2,17 %	2,17 %
SK2 Meningkatkan tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku											
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Sesuai dengan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja selama tahun Renstra BGTK Povinsi Maluku tahun 2025-2029 , maka penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 telah sinergis dan selaras dengan Renstra BGTK Provinsi Maluku pada tahun 2025. Hal ini juga diharapkan untuk tahun berikutnya dengan tetap melakukan reuiu terhadap renstra Balai

bersama dengan Dirjen GTKPG. Perjanjian Kinerja Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2025 terdiri dari Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi.

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja (Awal) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan dokumen penugasan dan komitmen kinerja antara Kepala BGTK Provinsi Maluku dengan Direktur Jenderal GTKPG yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Maluku. Berikut Ringkasan Perjanjian Awal BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1,63
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp18.669.131.000
2	7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp4.711.949.000
Total Anggaran			Rp23.381.080.000

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BGTK Provinsi Maluku disusun sebagai penyesuaian atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, seiring terjadinya perubahan pada alokasi anggaran dalam pelaksanaan program selama tahun berjalan. Berikut Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2025;

Revisi Perjanjian Kinerja BGTK Provinsi Maluku bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja tetap realistis, terukur, dan selaras dengan prioritas strategis kementerian serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Revisi Perjanjian Kinerja BGTK Provinsi Maluku dilakukan pada penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. 23.381.000.000 menjadi Rp. 22.749.645.000. Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada rasionalisasi pagu belanja pada program dan kegiatan pada tingkat balai.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1,63
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp17.393.619.000
2	7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp5.356.026.000
Total Anggaran			Rp22.749.645.000

Penetapan perjanjian kinerja revisi, BGTK Provinsi Maluku menegaskan kembali komitmen untuk mencapai sasaran kinerja dan menjadikan dokumen ini sebagai dasar pengukuran capaian kinerja akhir tahun 2025. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BGTK Provinsi Maluku menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban BGTK Provinsi Maluku atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, BGTK Provinsi Maluku melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja BGTK Provinsi Maluku pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui reviu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa kendala dalam implementasinya yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi operasional di lapangan.

BGTK Provinsi Maluku telah melakukan analisis terhadap capaian, kendala/permasalahan yang dihadapi dan merumuskan langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Proses ini disertai penguatan integrasi perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas data kinerja, serta pengawasan intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen BGTK Provinsi Maluku dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, BGTK Provinsi Maluku menetapkan 2 (Dua) Sasaran Kegiatan antara lain : Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) **Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan** dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.1.1) yakni Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajara dan Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) **Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku** dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu IKK.2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik dan IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A.

Pengukuran terhadap ketercapaian Perjanjian Kinerja BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025 dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui pemantauan realisasi kinerja setiap indikator, baik dari aspek capaian indikator kinerja kegiatan dan efektivitas pelaksanaan program, dengan membandingkan capaian aktual terhadap target yang telah ditetapkan. Proses pengukuran didukung oleh data dan informasi yang bersumber dari sistem pelaporan internal, hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan (SK.1)	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran (IKK.1.1)	Persen	1,63	1,66	102
2	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku (SK 2)	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik (IKK 2.1)	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	104
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A (IKK 2.2)	Predikat	A	A	105

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1)

Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan

Ketercapaian sasaran kegiatan **meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai ditunjukkan oleh **tingkat pencapaian realisasi target pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama Tahun 2025**. Capaian tersebut tercermin dari realisasi kinerja yang **melampaui target yang telah ditetapkan**, pada indikator Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 (IKK. 1.1)

Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

Guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran merupakan upaya strategis dan sistematis yang dilakukan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan melalui penyediaan layanan pengembangan profesional yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Fasilitasi tersebut mencakup pemberian akses terhadap berbagai program peningkatan kompetensi yang berorientasi pada penguatan kemampuan dalam proses pembelajaran yang bermutu, relevan, dan kontekstual, melalui pelaksanaan fasilitasi guru dan tenaga kependidikan difasilitasi untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, serta pengembangan praktik pembelajaran inovatif yang selaras dengan kebijakan kurikulum dan kebutuhan satuan pendidikan.

Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran adalah ukuran yang menunjukkan proporsi guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang memperoleh akses, kesempatan, dan terlibat langsung dalam kegiatan peningkatan kompetensi, dan menjadi sasaran pada kurun waktu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah total GTK secara keseluruhan. Program peningkatan kompetensi yang dimaksud mencakup berbagai kegiatan pengembangan kompetensi pengajaran dan pembelajaran, pendampingan pembelajaran, program pendidikan kepemimpinan sekolah dan peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan sains teknologi. Perhitungan berdasarkan persentase proporsi jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dengan Rumus :

$$PGTK (\%) = \frac{\sum GPKT}{\sum GTKS} \times 100\%$$

Keterangan:

PGTK (%)	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi
$\sum GPKT$	Jumlah GTK yang mengikuti program peningkatan kompetensi dalam periode tertentu
$\sum GTKS$	Jumlah GTK yang menjadi sasaran Program Peningkatan kompetensi secara keseluruhan

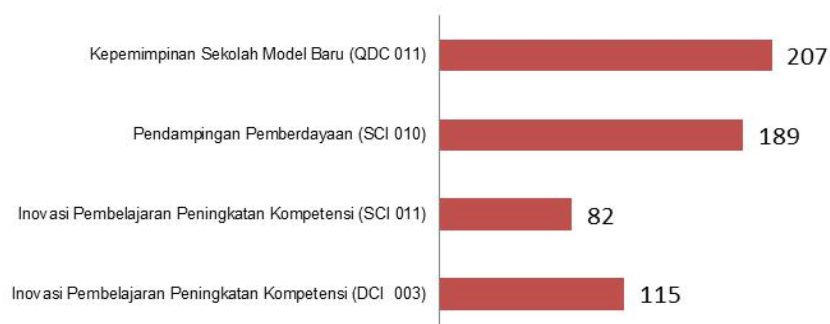
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.1.1), yaitu persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran, telah mencapai kinerja yang melampaui target pada tahun 2025. Target yang ditetapkan sebesar 1,63% berhasil direalisasikan sebesar 1,66%, sehingga terdapat selisih positif sebesar 0,03%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program peningkatan kompetensi mampu menjangkau sasaran lebih luas dari yang direncanakan.

Tabel 3. 2. Target dan Realisasi Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.1.1) BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Komponen	Uraian
1	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
2	Target	1,63 %
3	Realisasi	1,66 %
4	Data GTK	35.692 Orang
5	GTK Peserta	593 Orang
6	Tingkat Ketercapaian	Realisasi melampaui target sebesar 0,03 %
7	Sumber Capaian	Pelaksanaan pelatihan bidang pendidikan serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat

Realisasi capaian tersebut didukung oleh keterlibatan sejumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi, baik melalui kegiatan pelatihan bidang pendidikan maupun melalui fasilitasi dan pembinaan masyarakat. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terlibat menjadi basis utama dalam perhitungan persentase indikator dan mencerminkan tingkat keterjangkauan layanan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BGTK Provinsi Maluku.

Sumber utama pencapaian indikator berasal dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang secara terintegrasi, meliputi pelatihan bidang pendidikan serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat. Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan program telah berjalan efektif dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran kegiatan BGTK Provinsi Maluku dalam rangka peningkatan kapasitas profesional guru dan tenaga kependidikan serta penguatan mutu layanan pendidikan. Pencapaian IKK 1.1 merupakan akumulasi dari pencapaian pada setiap Rincian Output kegiatan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan dalam Program Peningkatan Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran BGTK Maluku Tahun 2025.



Gambar 3. 1 Garfik Rekapitulasi Pencapaian IKK 1.1 BGTK Maluku Tahun 2025

Klasifikasi dan rincian output kegiatan ini mencerminkan upaya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan, fasilitasi, dan pembinaan masyarakat. Berbagai kegiatan dirancang untuk memperkuat kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada aspek pedagogik, profesional, kepemimpinan, serta kemampuan adaptif terhadap inovasi pembelajaran dan perkembangan teknologi. Pelaksanaan program dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan tata kelola pendidikan. Rekapitulasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi dalam Program Peningkatan Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran BGTK Maluku Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Jumlah GKT yang Terfasilitasi dalam Program Peningkatan Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran BGTK Maluku Tahun 2025

No	Klasifikasi / Rincian Output/ Kegiatan
I	Pelatihan Bidang Pendidikan
A	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi (115 orang)
1.	Pelatihan Kompetensi Guru BK untuk Fasilitator Daerah (115 orang)
B	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru (189 orang)
1	CAKEP – Diklat Calon Kepala Sekolah (94 orang)
2	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah (32 orang)
3	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tenaga Laboran (32 orang)
4	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tenaga Perpustakaan (31 orang)
C.	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi sebanyak 82 orang
1	Pelatihan Matematika Gembira (41 orang)
2	Diseminasi Terbatas Pelatihan Matematika Gembira (13 orang)
3	In House Training (IHT) MG (18 orang)
4	Apresiasi GTK Provinsi Maluku (10 orang)
II	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

A	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran (207 orang)
1	Pendampingan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (27 orang)
2	Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi Pengawas Sekolah (131 orang)
3	Pelatihan Pembelajaran Mendalam untuk Fasilitator(49 orang)
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajara sebanyak 593 orang	

Pencapaian Guru dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi dalam Program Peningkatan Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran BGTK Maluku Tahun 2025 mencerminkan capaian balai terkait implementasi program prioritas pendidikan nasional Kemdikdasmen, sekaligus menunjukkan kontribusi BGTK Maluku terhadap peningkatan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan di tingkat balai sepanjang tahun 2025. Program prioritas dimaksud terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Sekolah, melalui Peningkatan kompetensi guru BK dan GTK yang Mendapatkan Pendampingan Pembelajaran
- Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru melalui Pengembangan Karir dan Penghargaan GTK, Program Kepemimpinan Sekolah (Calon KS, dan PS)
- Penguatan Pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi, melalui Peningkatan Kompetensi GTK untuk Inovasi Pembelajaran dan Pembelajaran Mendalam dan Koding-Kecerdasan Artifisial)

Dalam kaitannya dengan program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran melalui pelatihan bidang pendidikan serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat, maka berbagai kegiatan lainnya yang diimplementasikan pada tingkat balai di tahun 2025, antara lain :

- a. Bimtek Penguatan Pendidikan Karakter/PM/KA bagi GTK bersama Muhamadyah Maluku
- b. Lokakarya Uji Keterbacaan dan Pengisian Instrumen Monev SEAMEO QITEP in Language
- c. Verifikasi dan validasi berkas PPG,HGN, UKPBJ
- d. Pelatihan Alinthe Classroom and Interactive Vidio in Web Based Learning, Kerjasama dengan SEAMOLEC
- e. Temu Karya GTK PG
- f. Bimtek Metigasi Resiko Pengembangan Program/Pengadaan Barang Jasa
- g. Penguatan Pembelajaran Berbasis Riset dan Teknologi Digital/AI untuk Tim Kora-Kora
- h. Coaching Clinic Penghargaan GTK Tahun 2025
- i. Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru

Pencapaian terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 1.1) yang dicapai pada tingkat balai menunjukkan efektivitas pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil Pencapaian IKK 1.1 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terkait dengan ketersediaan data, namun dalam implementasi Renstra Balai tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang optimal dan melebihi target yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan program kegiatan terkait dengan pencapaian IKK 1.1 Balai GTK Provinsi Maluku juga diperhadapkan dengan sejumlah kendala dan permasalahan yang memengaruhi efektivitas program, antara lain:

1. Aspek Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Selama Triwulan I hingga memasuki Triwulan III, belum tersedianya Petunjuk Teknis (Juknis) dari unit pusat pada beberapa program kegiatan menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan optimal. Kondisi ini menyulitkan proses penyamaan pemahaman, penyelarasan tujuan dengan implementasi kegiatan, serta pengendalian kualitas output secara konsisten. Selain itu, sebagian kegiatan memerlukan dukungan Fasilitator Nasional (Fasnas) yang telah mendapatkan pelatihan di tingkat pusat, sehingga turut memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I dan Triwulan II, serta tingkat partisipasi peserta yang masih belum optimal pada beberapa kegiatan balai.

2. Penyesuaian Implementasi Program

Pelaksanaan kegiatan masih mengalami perlambatan hingga memasuki semester I berakhir akibat perlunya penyesuaian program kegiatan, jadwal dan mekanisme pelaksanaan sesuai kebijakan pusat serta kesiapan sumber daya pendukung pada tingkat balai. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya beberapa tahapan kegiatan dan belum optimalnya ritme pelaksanaan program secara keseluruhan, yang menunjukkan perlunya penguatan koordinasi internal dan eksternal serta penataan ulang perencanaan agar target kinerja dapat dicapai secara efektif.

3. Pembatasan dan Penataan Anggaran

Pembatasan anggaran pada berbagai tahap sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga serta penetapan prioritas nasional berdampak pada tidak optimalnya realisasi sebagian kegiatan dari Triwulan I hingga Triwulan III. Di sisi lain, pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih memerlukan penataan agar sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran tetap terjaga.

Dalam mengatasi permasalahan/kendala yang dialami guna pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 1.1) maka dilakukan melalui pengembangan strategi pelaksanaan tingkat balai sekaligus faktor pendukung dalam pelaksanaan program kegiatan pada tingkat balai, antara lain :

1. Penguatan Pemanfaatan Sumber Daya dan Kapasitas SDM

Pemanfaatan sumber daya internal Balai dioptimalkan untuk mendukung sosialisasi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 secara daring melalui kanal resmi Balai GTK (YouTube, Facebook, dan Instagram). Selain itu, dilakukan konsolidasi dan pengembangan kapasitas SDM internal guna membangun tim kerja yang solid, adaptif, dan berorientasi kinerja, termasuk penyiapan fasilitator daerah dari unsur guru, kepala sekolah, dan pengawas.

2. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Koordinasi dan konsultasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal serta direktorat teknis

terkait diintensifkan, baik secara luring maupun daring, untuk percepatan pembukaan blokir anggaran dan ketersediaan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan. Di tingkat daerah, penguatan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan untuk memastikan kesiapan dan partisipasi pemangku kepentingan. Selain itu, kolaborasi dengan mitra pembangunan (INOVASI, SEAMEO, dan lembaga terkait) dikembangkan guna meningkatkan dukungan, kualitas implementasi, dan peluang pencapaian target kinerja.

3. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program

Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, termasuk PNBK, terhadap target output. Hasil monitoring dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendala, melakukan penajaman prioritas, penyesuaian skala dan mekanisme pelaksanaan, serta menjaga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan program

Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)

Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku

Ketercapaian sasaran kegiatan **Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai ditunjukkan oleh tingkat pencapaian realisasi target pada Indikator Kinerja Kegiatan pada **(IKK 2.1) Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik** dan **(IKK.2.2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A selama Tahun 2025**.

Pencapaian tersebut ditunjukkan melalui realisasi kinerja yang telah sesuai, dengan target yang ditetapkan pada kedua indikator dimaksud. Hal ini telah menunjukkan bahwa tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku telah mengarah pada efektifitas, akuntabilitas dan berorientasi pada kinerja, yang tercermin dari kemampuan balai dalam mengelola anggaran secara efisien, melaksanakan program dan kegiatan secara terencana, serta mempertanggungjawabkan kinerja organisasi sesuai prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 (IKK. 2.1)

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator kinerja komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran Satuan Kerja Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Maluku secara komprehensif, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan ketercapaian hasil. NKA tidak hanya merefleksikan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menilai keseimbangan antara kinerja substantif anggaran berupa ketercapaian output dan kinerja administratif anggaran berupa kualitas tata kelola pelaksanaannya.

PMK 22/PMK.02/2021 yang diintegrasikan dan dioperasionalkan melalui PMK Nomor 107 Tahun 2024, mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran secara terpadu, termasuk penguatan peran Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dalam menilai efektivitas

dan efisiensi belanja. Selanjutnya PER-5/PB/2024 mengatur petunjuk teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang berfokus pada kualitas tata kelola, kepatuhan, dan ketertiban pelaksanaan anggaran dari aspek perbendaharaan negara, maka nilai akhir NKA merupakan hasil penggabungan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot masing-masing sebesar 50 persen dengan rumus perhitungan :

$$\text{NKA Satker} = (50\% \times \text{Nilai EKA}) + (50\% \times \text{Nilai IKPA}).$$

Nilai EKA dihitung berdasarkan capaian output dan nilai efisiensi berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023, dengan formula $EKA = (90\% \times \text{Capaian Output}) + (10\% \times \text{Nilai Efisiensi SBK})$ dan diperoleh melalui aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA dihitung berdasarkan agregasi delapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sesuai PER-5/PB/2024 dan bersumber dari data pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Tabel 3. 4. Target dan Realisasi Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.2.1) BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Komponen	Uraian
1	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai GTK Provinsi Maluku minimal Sangat Baik
2	Target	Minimal Sangat Baik
3	Nilai EKA	100
4	Nilai IKPA	86,71
5	NKA Realisasi	93,36
6	NKA minimal	90 (Batas bawah NKA predikat sangat Baik)
7	Persentase Capaian	$NKA \text{ realisasi } / NKA \text{ minimal} \times 100\% = 104 \%$
8	Tingkat Ketercapaian	Realisasi memenuhi kriteria minimal sangat baik
9	Sumber Capaian	Aplikasi SMART DJA (EKA) dan OM-SPAN (IKPA) PerDesember 2025

Perhitungan terhadap Nilai Kinerja Anggaran BGTK Provinsi Maluku tahun 2025 pada bulan Desember 2025 sebesar 93,36 yang merupakan integrasi dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 100 dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 86,71. Hal ini menunjukkan bahwa target perjanjian kerja pimpinan BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025 telah terpenuhi dan sekaligus mencerminkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan target Perjanjian Kinerja balai tahun 2025.

Hasil pencapaian ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 maka masih dalam kategori yang sama namun memiliki nilai capaian yang berbeda. Perbedaan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BGTK Provinsi Maluku dari tahun sebelumnya merupakan tantangan tersendiri terutama dipengaruhi oleh aspek kualitas pelaksanaan anggaran, khususnya pada komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sehingga perlu melakukan penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, peningkatan kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan perbendaharaan, serta optimalisasi koordinasi internal guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Dalam pemenuhan

pencapaian target Renstra balai tahun 2025 hasil ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 5. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025 dan Tahun 2024

Tahun	Capaian NKA	Kategori Predikat
2024	95,69*)	Sangat Baik
2025	93,36	Sangat Baik

*) Sumber : Lakin BGP Maluku, 2024

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam upaya pencapaian IKK. 2.1 pada tingkat balai menghadapi beberapa permasalahan/kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja anggaran. Adapun permasalahan/kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Fleksibilitas dan Kebijakan Anggaran

Penerapan kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga serta adanya blokir anggaran membatasi fleksibilitas pengelolaan anggaran, sehingga memengaruhi ruang gerak pelaksanaan program prioritas dan pola penyerapan anggaran sepanjang tahun anggaran berjalan.

2. Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Penyesuaian perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara berulang, termasuk terjadinya deviasi terhadap Halaman III DIPA, berdampak pada ketidaksinkronan antara realisasi belanja dan capaian output kegiatan, serta berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan sebagian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

3. Aspek Kelembagaan dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Perubahan nomenklatur kelembagaan dari Balai Guru Penggerak (BGP) menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) memerlukan penyesuaian administratif dalam perencanaan dan penganggaran. Selain itu, dari perspektif Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), capaian output kegiatan belum sepenuhnya terealisasi tepat waktu. Konsentrasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran lebih pada semester akhir, menyebabkan implementasi beberapa kegiatan belum berjalan optimal dan penyerapan anggaran belum merata sepanjang tahun anggaran, sehingga memerlukan peningkatan efisiensi dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada nilai kinerja anggaran.

Dalam upaya mengatasi permasalahan/kendala yang dialami guna pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2.1) yang telah ditetapkan dilakukan melalui pengembangan strategi pelaksanaan tingkat balai sekaligus faktor pendukung dalam pelaksanaan program kegiatan pada tingkat balai, antara lain :

1. Optimalisasi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Balai melaksanakan perencanaan kerja yang adaptif dan fleksibel melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran, pengajuan pembukaan blokir, revisi DIPA, serta penataan pemanfaatan PNPB sesuai ketentuan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan

pelaksanaan kegiatan, meningkatkan daya serap anggaran, serta memastikan ketercapaian output sesuai target kinerja.

2. Penguatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kinerja

Koordinasi intensif dengan unit pusat, Kanwil DJPb, dan KPPN dilakukan untuk menjamin keselarasan kebijakan, ketertiban administrasi anggaran, serta pengendalian deviasi Halaman III DIPA. Penguatan monitoring dan evaluasi internal secara berkala juga dilaksanakan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap indikator IKPA dan EKA, serta ketepatan waktu pencapaian output.

3. Penguatan Kapasitas Pelaksanaan dan Kemitraan Strategis

Balai memperkuat kapasitas dan kolaborasi tim kerja melalui konsolidasi internal, peningkatan kesiapan sumber daya, serta pengembangan mekanisme kerja lintas tim. Di samping itu, kemitraan dengan pemerintah daerah dan mitra pembangunan terus dikembangkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan peningkatan capaian output secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 (IKK. 2.2)

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian aktivitas, alat, dan prosedur yang sistematis untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 menyatakan bahwa SAKIP mencakup rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revaluasi laporan kinerja. SAKIP merupakan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pimpinan Balai tahun 2025, Predikat SAKIP BGP Provinsi Maluku ditetapkan pada peringkat A, yang menunjukkan capaian kinerja Balai dalam kategori Memuaskan dengan skor 80–90 yang merefleksikan keberhasilan Balai dalam membangun sistem manajemen kinerja yang andal, efisien, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*), serta mencerminkan integrasi yang efektif antara perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pengelolaan data, dan akuntabilitas publik.

$$\text{Nilai AKIP} = (\text{NPK} \times 30\%) + (\text{NMK} \times 30\%) + (\text{NLPK} \times 15\%) + (\text{NEI} \times 25\%)$$

Formula perhitungan ini mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal dengan bobot yang proporsional untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja setiap instansi pemerintah termasuk BGTK Provinsi Maluku.

Dalam upaya pencapaian IKK 2.2 dilakukan melalui integrasi kegiatan perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja pada tingkat Balai. Secara spesifik, langkah-langkah yang dilaksanakan meliputi: penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai,

penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), penyusunan rencana aksi, pengukuran kinerja, serta penyesuaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai untuk tahun 2025. Implementasi kegiatan ini didukung oleh pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi, antara lain: aplikasi Spasikita untuk penyusunan rencana aksi dan pengisian capaian Triwulan, SAKTI dan E-Monev Bappenas untuk pengisian capaian output bulanan. Pendekatan ini menunjukkan adaptasi BGTK Provinsi Maluku terhadap praktik manajemen kinerja pemerintahan berbasis data dan digitalisasi, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Evaluasi dan monitoring kinerja dilakukan secara triwulanan untuk meninjau pencapaian program, kegiatan, dan anggaran, serta secara bulanan melalui rapat koordinasi guna menyesuaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pengawasan oleh tim internal Balai guna memastikan pengelolaan kegiatan dan anggaran dilaksanakan secara tepat, efisien, dan efektif, sesuai prinsip pengendalian internal pemerintah.. Secara keseluruhan, pelaksanaan IKK 2.2 pada BGTK Provinsi Maluku mencerminkan integrasi yang harmonis antara perencanaan strategis, manajemen kinerja berbasis indikator, digitalisasi pengelolaan data, dan pengawasan internal, sehingga mendukung tercapainya akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai.

Hasil penilaian AKIP Balai terhadap pencapaian IKK 2.2, yang diterbitkan oleh Inpektorat Jenderal Kemendikdasmen pada tahun 2025, menunjukkan bahwa BGTK Provinsi Maluku memperoleh predikat A . Predikat ini mencerminkan capaian kinerja balai yang sangat memuaskan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan BGTK Provinsi Maluku tahun 2025.

Tabel 3. 6 Target dan Realisasi Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK.2.2) BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Komponen	Uraian
1	Indikator Kinerja Kegiatan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A
2	Target	Minimal A
3	Nilai AKIP Realisasi	83,8
4	Nilai AKIP Minimal	80 (Batas Bawah Predikat Kategori A)
5	Persentase Capaian	Nilai Akip realisasi /Nilai AKIP minimal x 100% = 105 %
6	Tingkat Ketercapaian	Realisasi memenuhi kriteria minimal A
7	Sumber Capaian	Dokumen Penilaian Irjen Kemendikdasmen 2025

Penilaian peringkat AKIP Balai untuk pencapaian IKK 2.2 tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024, menunjukkan bahwa meskipun pencapaian indikator tetap sama, nilai penilaian mengalami peningkatan. Hal ini menandakan adanya perbaikan kinerja dan penguatanserta peningkatan sistem manajemen kinerja balai dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 7. Perbandingan Nilai AKIP BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025 dan Tahun 2024

Tahun	Nilai AKIP	Kategori Predikat
2024	82*)	A
2025	83,8	A

*) Sumber : Lakin BGP Maluku, 2024

Pencapaian IKK 2.2 pada tahun 2025 telah memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 untuk tahun pertama pelaksanaannya. Capaian ini memberikan kontribusi positif terhadap kinerja balai, yang didukung faktor sinergitas dan koordinasi yang efektif baik secara internal maupun dengan pemangku kepentingan eksternal. Pencapaian IKK 2.2 tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh BGTK Provinsi Maluku sepanjang tahun 2025., yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan (Renja/RKA), penyiapan Perjanjian Kinerja (PK) pada tingkat balai dan penyiapan Rencana Aksi maupun penyiapan Rencana Strategi (Renstra) Balai yang akan diselaraskan dengan RPJMN, Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Dirjen GTK PG, perencanaan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan penyusunan Perjanjian Kerja dengan melakukan cascading kinerja hingga ke level tim kerja dan individu pada masing - masing tim kerja.
2. Penyiapan dan penyelesaian Lakin Balai Tahun 2024, penyiapan format dan pengumpulan data evaluasi bulanan, Penyiapan dan Penyelesaian Perjanjian Kinerja maupun Rencana Aksi, Reviu dan penyiapan Renstra Balai/Rencana Kinerja Tahunan serta evaluasi kinerja bulanan dan kinerja triwulanan. serta sosialisasi Perjanjian Kinerja bagi staf balai
3. Penyiapan bahan-bahan pendukung yang dibutuhkan terkait dengan evaluasi akuntabilitas secara mandiri pada tingkat Balai dan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri AKIP pada tingkat Balai.
4. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara objektif dan berkelanjutan setiap bulan melalui evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja balai. Proses pengukuran dan pelaporan kinerja dilakukan secara terintegrasi melalui pemanfaatan sistem informasi kinerja, antara lain aplikasi e-Monev Bappenas dan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.
5. Mengoptimalkan kinerja tim kerja balai agar melaksanakan kegiatan secara dinamis dan masif untuk meningkatkan kinerja balai, memperkuat kapasitas SDM yang tersedia, melakukan kolaborasi dengan pihak terkait, serta menjalankan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui forum rapat evaluasi untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis.

Hasil pencapaian IKK 2.2 menunjukkan balai telah memenuhi target yang ditetapkan, meskipun terdapat kendala dalam upaya pencapaiannya dan perlu ditindaklanjuti untuk memastikan kinerja tetap optimal, konsisten dan berkelanjutan.. Kendala /permasalahan tersebut antara lain :

1. Perencanaan Kinerja:

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai masih perlu diselaraskan dengan Renstra Kemendikdasmen dan Renstra Dirjen GTK PG agar relevan, sinergis, dan konsisten dengan arah kebijakan serta sasaran strategis di tingkat pusat, sekaligus mendukung penyiapan dokumen SAKIP yang komprehensif.

2. Pemahaman Komponen SAKIP:

Pemahaman terhadap komponen SAKIP di tingkat balai masih belum merata, meskipun SAKIP merupakan kerangka sistematis untuk penetapan dan pengukuran kinerja, pengolahan

data, dan pelaporan kinerja, dengan tujuan menjamin pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja balai.

3. Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan pengukuran kinerja di tingkat balai bertujuan untuk menilai capaian program dan realisasi anggaran secara sistematis sebagai bagian dari pengelolaan kinerja balai. Pelaksanaan pengukuran kinerja masih menghadapi kendala terkait percepatan, konsistensi, dan penyelarasan pelaporan data, sehingga efektivitas pengukuran kinerja perlu dioptimalkan. Penguatan mekanisme internal diperlukan agar menyediakan data pengukuran kinerja akurat dalam mendukung pelaporan kinerja balai secara terintegrasi dan akuntabel.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mandiri

Pelaksanaan penilaian SAKIP secara mandiri di tingkat balai memerlukan penyiapan bahan pendukung yang memadai, sebagian belum tersedia secara optimal. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama seluruh komponen terkait di balai agar evaluasi mandiri dapat dilaksanakan secara efektif dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berkaitan permasalahan/kendala yang dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2.2) yang telah ditetapkan maka upaya pengembangan strategi tindak lanjut yang dilakukan pada tingkat balai, antara lain :

1. Penyelarasan Perencanaan dan Penguatan Pemahaman SAKIP

Pelaksanaan sinkronisasi dokumen perencanaan mencakup penajaman sasaran strategis, indikator kinerja, dan program prioritas, sekaligus memastikan dokumen SAKIP tersedia secara konsisten, terukur, dan akuntabel. Selain itu, penguatan pemahaman melalui rapat-rapat internal balai terkait perencanaan dan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja agar seluruh staf balai memahami peran komponen SAKIP dalam meningkatkan pertanggungjawaban dan kualitas kinerja.

2. Penguatan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

Penguatan mekanisme internal balai melalui percepatan, konsistensi, dan penyelarasan pelaporan data terkait integrasi data berbasis aplikasi guna memastikan data kinerja balai akurat, komparatif, dan akuntabel, sehingga pelaporan kinerja menjadi lebih efektif, terintegrasi, mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja yang tepat sasaran.

3. Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Pemanfaatan hasil Monev pelaksanaan anggaran dan kegiatan digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja BGTK Provinsi Maluku. Mekanisme tindak lanjut rekomendasi disusun secara terstruktur, meliputi penetapan prioritas, batas waktu penyelesaian, dan pemantauan berkala. Pendekatan ini memastikan konsistensi perbaikan, meningkatkan efektivitas tindak lanjut, serta mendorong pencapaian kinerja balai yang berkelanjutan, terintegrasi, dan terukur

4. Penguatan Koordinasi Internal dan Eksternal

Penguatan koordinasi antar tim di balai dan dengan unit pembina di pusat dilakukan untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan serta penguatan kinerja lembaga, seluruh

proses pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja berjalan efektif, mendukung akuntabilitas, serta mendorong peningkatan kualitas kinerja balai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada BGTK Provinsi Maluku menunjukkan kinerja yang efektif dan akuntabel. Realisasi anggaran telah dioptimalkan pada tingkat balai dalam mendukung pencapaian output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengelolaan anggaran telah dilakukan melalui perencanaan yang terarah, pengendalian internal yang konsisten, serta penyesuaian kegiatan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program.

Pagu anggaran BGTK Provinsi Maluku pada DIPA awal tahun 2025 sebesar Rp 23.381.080.000 dan dalam beberapa kali revisi dan perubahan, pagu anggaran dalam DIPA akhir tahun 2025 menjadi Rp 22.749.645.000, Dari posisi pagu anggaran Rp 22.749.645.000 berhasil direalisasikan Rp.14,624,267,586 dengan persentase daya serap sebesar 64.28 % sehingga belum optimal, selain dari aspek sisa anggaran kegiatan juga hingga akhir tahun 2024 masih terdapat anggaran blokir sebesar Rp 7.749.506.000 sesuai kebijakan pusat berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 8. Alokasi dan Realisasi Anggaran BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

No	Komponen	Uraian
1	DIPA Awal	Rp. 23.381.080.000
2	DIPA Revisi/Akhir	Rp. 22.749.645.000
3	Realisasi Anggaran	Rp. 14,624,267,586
4	Persentase Serapan	64,28 %
7	Blokir Anggaran	Rp. 7.749.506.000

Sumber : Mon Sakti, 31 Desember 2025

Realisasi anggaran Rp.14,624,267,586 telah digunakan untuk membiayai pencapaian pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Realisasi anggaran BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025 dilaksanakan dalam kondisi sebagian alokasi anggaran masih berada dalam status blokir, sehingga capaian realisasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan belum dapat berjalan secara optimal terutama pada sasaran kegiatan (SK 1) Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan (Blokir anggaran sebesar Rp.7.749.506.000. Berikut rincian realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana PK Pimpinan BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025.

Tabel 3. 9. Realisasi Anggaran PerSasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(SK.1) Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	(IKK.1.1) Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	17.393.619.000	7.749.506.000	9.589.558.864	55,13
(SK 2) Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku	(IKK 2.1) Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	5.283.942.000	-	4.962.781.242	93,92
	(IKK 2.2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A	72.084.000	-	71.927.480	99,78
	Total	22.749.645.000	7.749.506.000	14,624,267,586	64,28

Realisasi anggaran pada masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan anggaran yang berlaku. Perbedaan tingkat penyerapan antar indikator kinerja menunjukkan adanya variasi dampak pemblokiran terhadap pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi komitmen satuan kerja dalam menjaga capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja pada satuan kerja.

Perhitungan efisiensi anggaran pada BGTK Provinsi Maluku dilakukan melalui perbandingan indeks biaya realisasi dengan indeks biaya standar sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran. Penghitungan efisiensi dilakukan secara kuantitatif melalui aplikasi SAKTI dan instrumen Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan data hasil sinkronisasi realisasi keuangan dan capaian kinerja fisik secara real-time.

Tabel 3. 10. Efisiensi Anggaran Program/Kegiatan BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1 ¹	2 ²	3 ³	4 ⁴	5 ⁵	6 ⁶	7 ⁷	8 ⁸	9 ⁹	10 ¹⁰	11 ¹¹	12 = 9/11 ¹²	13 = 8-12 ¹³	14 = 13/8 ¹⁴	15 ¹⁵	16 ¹⁶
32	DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU	693357 BALAI GTK PROVINSI MALUKU	WA Program Dukungan Manajemen	7619.69A.906 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	10.000.000	13.100.000	3,00	3,00	4.366.666	5.633.334	56,33	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Sumber : Monev, Kemenkeu.go.id, 31 Desember 2025

Efisiensi anggaran pada tahun 2025 dapat dilaksanakan secara optimal pada Balai GTK Provinsi Maluku dengan melakukan efisiensi anggaran pada program dukungan manajemen layanan Barang Milik Negara (BMN) dengan capaian Nilai efisiensi sekitar 20 persen. Berdasarkan hasil pengukuran, indeks Standar Biaya Keluaran (SBK) ditetapkan sebesar Rp10.000.000, sementara indeks realisasi anggaran tercatat sebesar Rp 4.366.666, sehingga biaya yang digunakan hanya sekitar 43,6 persen dari pagu standar yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang signifikan, dengan tingkat efisiensi mencapai sekitar 56,3 persen dibandingkan batas kewajaran biaya, karena output dapat dihasilkan dengan biaya yang jauh lebih rendah dari standar tanpa mengurangi kualitas maupun volume keluaran.

Disisi lain terkait dengan efisiensi dalam realisasi anggaran BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian output kinerja dapat dihasilkan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari alokasi yang direncanakan. Pada Sasaran Kegiatan (SK.1) Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 1.1) dari alokasi anggaran sebesar Rp17.393.619.000, realisasi anggaran mencapai Rp9.590.458.864 atau 55,13 persen.

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemblokiran anggaran pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp7.749.506.000, serta sisa anggaran kegiatan sebesar Rp 52.452.939. Namun demikian, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh target output yang ditetapkan tetap tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran pada sasaran kegiatan tersebut dinilai efisien, karena output kinerja dapat direalisasikan secara optimal tanpa memerlukan pemanfaatan seluruh alokasi anggaran. Sementara itu, pada Sasaran Kegiatan (SK.2) Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku, kinerja penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada IKK 2.1, realisasi anggaran mencapai 93,92 persen, dan pada IKK 2.2 mencapai 99,78 persen. Tingginya tingkat realisasi tersebut mencerminkan efektivitas, efisiensi, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja Balai.

C. Kinerja Lain-lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BGTK Provinsi Maluku adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada BGTK Provinsi Maluku dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan Kualitas Layanan Publik	B. Digitalisasi Layanan dan Administrasi
a. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang memuat persyaratan, alur, waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan. b. Menyediakan layanan informasi dan konsultasi yang lebih mudah diakses oleh guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. c. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.	a. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi dalam pengelolaan layanan guru dan tenaga kependidikan. b. Mendorong penggunaan surat-menyurat elektronik, arsip digital, serta sistem persuratan berbasis aplikasi untuk mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat disposisi. c. Mendukung integrasi data dengan sistem pusat guna meningkatkan akurasi dan keterpaduan informasi
C. Penguatan pengawasan dan Integritas	D. Penguatan keterbukaan Informasi publik
a. Mendorong penerapan budaya kerja yang berintegritas melalui sosialisasi nilai-nilai anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. b. Mengoptimalkan fungsi pengendalian internal serta tindak lanjut atas hasil pengawasan. c. Menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang jelas dan mudah diakses.	a. Menyediakan informasi publik yang mudah diakses melalui media resmi dan kanal digital. b. Menunjuk dan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan layanan informasi
E. Peningkatan kualitas SDM	F. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
a. Mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan jabatan. b. Menanamkan budaya kerja profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan. c. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	a. Menyelaraskan perencanaan kinerja individu dan unit kerja dengan perjanjian kinerja serta indikator kinerja utama BGTK. b. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala. c. Menyusun laporan kinerja yang lebih transparan dan berbasis hasil (result-oriented)

Pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat balai akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Upaya tersebut mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan serta pencapaian sasaran strategis yang selaras dengan kebijakan pendidikan nasional.

2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2025 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja pada tingkat balai, diantaranya :

- Berbagai Webinar diantaranya Gerakan Numerasi Nasional membumi di Maluku, Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial untuk Mendukung Kegiatan Pembelajaran, Literasi Digital Siswa dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, Roadshow Webinar Canva Pendidikan "Pelatihan membuat lembar aktifitas Digital Interaktif untuk mendorong Pemahaman Mandiri", Webinar Praktik Baik Guru Dedikatif di Daerah 3T, Webinar Praktik Baik Kepala Sekolah Dasar Inovatif, Webinar Praktik Baik Guru SMP dan SD Inovatif.
- Joyful Learning With Sekolah Enuma pada beberapa Kabupaten Kota (Seram Bagian Barat, Ambon, Tual, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara)
- Pemanfaatan PNPB dalam Pelaksanaan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), Pelatihan PM Bagi Kepala Sekolah, Pelatihan PM Bagi Guru, Pelatihan BCKS.

3. Inovasi

BGTK Provinsi Maluku pada tahun 2025 telah melaksanakan berbagai inovasi program yang

dirancang untuk menjawab tantangan konteks wilayah, memperkuat relevansi program dengan kebutuhan satuan pendidikan, dan membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Beberapa inovasi utama yang dilakukan antara lain:

1. Penyusunan Modul Ajar untuk peningkatan kecakapan dasar siswa terintegrasi Delapan dimensi profil lulusan berbasis kearifan lokal.

Penyusunan Modul ajar ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dasar siswa, terutama literasi dan numerasi, secara terintegrasi dengan delapan dimensi Profil Lulusan dan berbasis kearifan lokal Maluku, seperti nilai *pela gandong*, *sasi*, kehidupan maritim, serta praktik sosial budaya setempat. Modul ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dengan pengalaman belajar yang kontekstual, bermakna, dan berfokus pada penguatan akademik, karakter, kolaborasi, serta kewargaan.

Penerapan modul ajar akan berdampak pada peningkatan pemahaman literasi dan numerasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, penguatan nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan, serta mendorong guru merancang pembelajaran adaptif sesuai keberagaman kemampuan siswa. Dengan demikian, modul ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun generasi Maluku yang literat, numerat, berkarakter, dan berakar kuat pada budaya lokal.

2. Kemah Pendidikan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Guru di Daerah 3T

Kemah Pendidikan 3T merupakan inovasi program peningkatan kompetensi guru dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, kontekstual, dan lintas pemangku kepentingan (*pentahelix*) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), khususnya Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Program ini menyatukan kegiatan belajar, pengabdian masyarakat, kunjungan lapangan, literasi, penguatan numerasi, dan pembinaan spiritual, sehingga proses belajar dekat dengan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan nyata satuan pendidikan dan masyarakat lokal.

Maksud utama program ini adalah membangun ruang kolaborasi nyata antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk memperkuat tiga pilar dasar pembangunan sumber daya manusia yakni literasi, numerasi, dan spiritualitas, sekaligus menguatkan karakter, nilai kebersamaan, dan kepedulian sosial. Dampak inovasi terlihat pada meningkatnya kapasitas dan motivasi guru, penguatan ekosistem literasi masyarakat melalui Taman Bacaan Masyarakat dan distribusi bahan bacaan, tumbuhnya kesadaran penguatan karakter dan spiritual, serta terbentuknya jejaring kolaborasi lintas sektor dan roadmap pendidikan berkelanjutan di wilayah 3T.

3. Gerakan Semangat Kora-Kora

Gerakan Semangat KORA-KORA merupakan inovasi program berbasis komunitas yang digagas untuk memperkuat kolaborasi guru, kepala sekolah, siswa, dan pemangku kepentingan pendidikan di Maluku. Program ini mengangkat nilai kearifan lokal, yakni *kora-kora* (*perahu*

tradisional) dan semangat masohi (gotong royong), sebagai simbol kolaborasi, kebersamaan, dan kepemimpinan kolektif dalam memajukan pendidikan.

Program ini bermaksud untuk membangun ekosistem komunitas belajar yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif melalui berbagi praktik baik, penguatan kompetensi penggerak komunitas, serta perluasan jejaring antar sekolah dan komunitas. Dampak inovasi terlihat pada meningkatnya kapasitas penggerak komunitas dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran, menguatnya budaya berbagi praktik baik, terbentuknya jejaring kolaborasi lintas satuan pendidikan dan wilayah, serta tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa peningkatan mutu pembelajaran hanya dapat dicapai melalui kerja bersama. Secara tidak langsung, program ini juga mendukung penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui pembelajaran kolaboratif, kontekstual, dan berakar pada budaya lokal Maluku.

4. Penghargaan

BGTK Provinsi Maluku tahun 2025 menerima penghargaan bagi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah atas inovasi kemitraan dalam pengembangan dan pemberdayaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui Pelatihan Pembelajaran Mendalam dan Koding Kecerdasan Artifisial di Kabupaten Maluku Tengah.



5. Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2025 BGTK Provinsi Maluku melakukan program *crosscutting/collaborative*, antara lain :

- Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial,
- Pelatihan Pembelajaran Mendalam, dan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) pembiayaan APBD
- Pelatihan Alinthe Classroom and Interactive Video in Web Based Learning, Kerjasama dengan SEAMOLEC
- Lokakarya Kolaboratif SEAQIL–BGTK Provinsi Maluku: Penguatan Kerjasama Kelembagaan dan Uji Keterbacaan Instrumen Monev SEAQIL

Pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting/collaborative* antara lain Direktorat Jenderal, Direktorat, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BGTK Provinsi Maluku sebagai UPT Kemendikdasmen, Satuan Pendidikan, SEAMOLEC, SEAQIL, Peranan setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan beberapa program *crosscutting/collaborative* dengan BGTK Provinsi Maluku tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Program	Direktorat Jenderal	BGTK Maluku (UPT)	Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota	Satuan Pendidikan
Pelatihan Guru Koding & KA	Menyusun modul, norma, prosedur; menyiapkan narasumber, LMS, sistem pendaftaran; koordinasi dan penjaminan mutu	Koordinasi dengan Dinas & sekolah, menyiapkan perangkat, menyelenggarakan pelatihan, menerbitkan sertifikat, penjaminan mutu	Mendukung penyediaan guru & fasilitas, memfasilitasi KKG/MGMP	Menyiapkan guru peserta, pembiayaan, sarana/prasarana pelatihan
Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM)	Menetapkan petunjuk teknis, sertifikasi, modul, LMS, ToT, RAB, penjaminan mutu, koordinasi UPT	Menyiapkan pelatihan & ToT pengajar, RAB, sarana/prasarana, koordinasi Dinas, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi, fasilitasi komunitas belajar berkelanjutan	Koordinasi & fasilitasi pelatihan, penyediaan sarana, pendanaan, sosialisasi, monitoring, pendampingan ke sekolah	Mengusulkan peserta, mendaftar, menyediakan pendanaan, mendukung kompetensi berkelanjutan
Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS)	Menetapkan hasil ToT & pelatihan, LPP, sertifikasi peserta & pengajar	Koordinasi pelatihan dengan Direktorat & Dinas, menyiapkan sarana/prasarana, admin, pengajar, LMS, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan	Memetakan kebutuhan, menyediakan pendanaan, mengusulkan peserta, seleksi administrasi/substansi, koordinasi pelatihan, penetapan penugasan CKS	Mendukung seleksi & pelatihan peserta, menyediakan sarana/prasarana, pendanaan

Program *crosscutting/collaborative* yang dilakukan pada tahun 2025 diharapkan memberikan dampak bagi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terutama di Provinsi Maluku

Kegiatan	Maksud Program	Dampak Utama Program
Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA)	Menyiapkan guru agar mampu mengampu mata pelajaran Koding dan KA secara bertahap, terstandar, dan berkelanjutan sesuai kebijakan nasional transformasi digital pendidikan.	■ Guru memiliki kompetensi awal Koding dan KA sesuai standar nasional. ■ Sekolah mulai siap mengimplementasikan Koding dan KA secara bertahap. ■ Terbentuk ekosistem KKG/MGMP Koding dan KA di daerah. ■ Terjadi akselerasi literasi digital dan computational thinking murid.
Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM)	Meningkatkan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam merancang pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.	■ Guru mampu merancang pembelajaran yang berdampak pada kehidupan nyata murid. ■ Kepala sekolah dan pengawas memiliki bahasa bersama tentang mutu pembelajaran. ■ Terbangunnya komunitas praktik pembelajaran mendalam di KKG/MGMP. - Pembelajaran bergeser dari administratif ke reflektif dan transformatif

Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) APBD	Menyiapkan calon kepala sekolah yang kompeten, terstandar, dan siap ditugaskan sesuai kebutuhan daerah.	■ Tersedianya pipeline calon kepala sekolah sesuai kebutuhan daerah. ■ Penugasan kepala sekolah lebih objektif, transparan, dan terstandar. ■ Meningkatnya kualitas kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan. ■ Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dalam penyiapan KS.
--	---	--



MoU Program PM dan KKA dengan Kadis Maluku Tengah



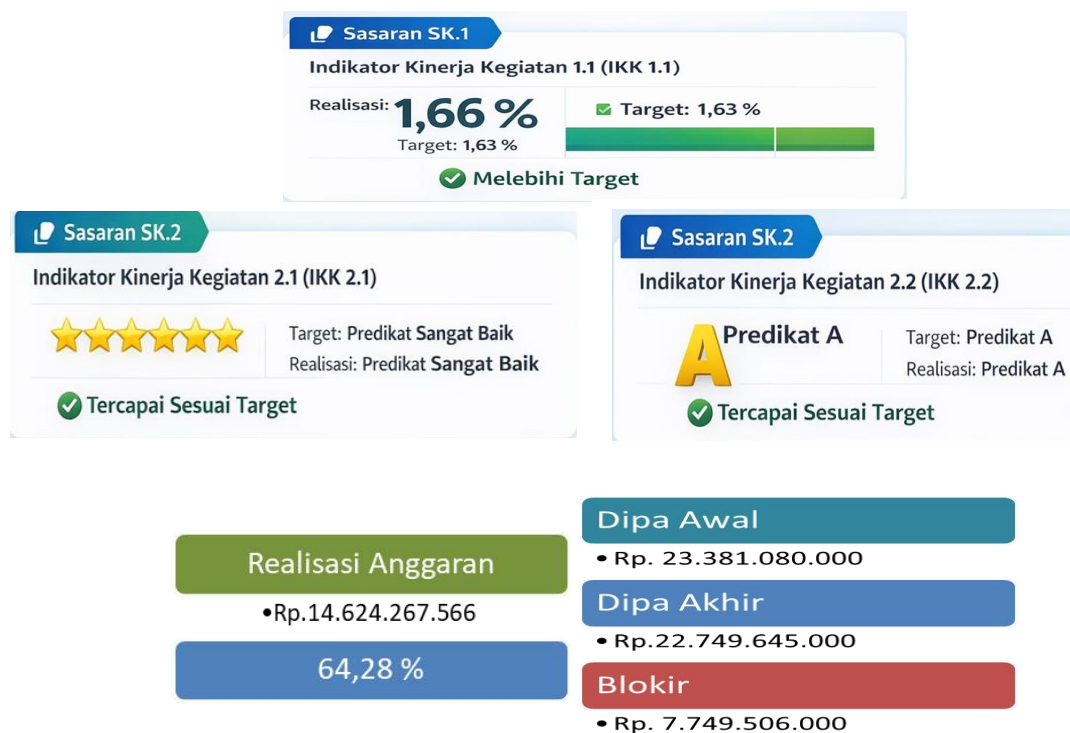
MoU Pelatihan BCKS dengan Kab. Maluku Tengah



MoU Pelatihan BCKS dengan Bupati Maluku Tengah

BAB IV Penutup

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas BGTK Provinsi Maluku atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan BGTK Provinsi Maluku dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Selama tahun 2025, BGTK Provinsi Maluku berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian sasaran Kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan.



Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, BGTK Provinsi Maluku berkomitmen untuk memperkuat peningkatan kinerja di tahun berikutnya dalam penguatan tata kelola, efektivitas program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja semakin selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029. Dari hasil evaluasi kinerja terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan di balai perlu diakselerasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan melalui penyesuaian program, penataan jadwal, dan mekanisme pelaksanaan yang selaras dengan kebijakan pusat. Selain itu, kesiapan sumber daya pendukung yang kompetitif harus dijamin agar pelaksanaan kegiatan tidak tertunda dan terkonsentrasi pada triwulan akhir. Dengan langkah ini, ritme implementasi program secara keseluruhan dapat dioptimalkan sehingga pencapaian output kinerja lebih efektif dan tepat waktu.
2. Sinkronisasi implementasi program dan penganggaran melalui konsistensi antara implementasi program dan target realisasi anggaran perlu dijaga melalui penyesuaian

perencanaan dan penganggaran yang terkait dengan deviasi Halaman III DIPA. Upaya ini penting untuk mengoptimalkan pemenuhan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), yang berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi terintegrasi terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

3. Penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja terhadap pencapaian program dan realisasi anggaran membutuhkan konsistensi serta penyelarasan dengan data realisasi anggaran. Penguatan mekanisme internal diperlukan agar data kinerja akurat, integratif, dan mendukung pelaporan capaian kinerja balai secara akuntabel, sesuai dengan anggaran yang terealisasi.
4. Optimalisasi realisasi dan alokasi anggaran perlu dilakukan secara konsisten meskipun terdapat pembatasan penggunaan anggaran sesuai kebijakan pusat. Strategi perencanaan dan penganggaran harus responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas output.
5. Pengembangan kemitraan strategis dan koordinasi dengan pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan terkoordinasi, mendukung keselarasan program, serta memperkuat dukungan lintas fungsi. Sinergi ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas implementasi kegiatan dan pencapaian target kinerja balai secara berkelanjutan

Sejalan dengan itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, BGTK Provinsi Maluku telah menetapkan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Upaya peningkatan tersebut difokuskan pada penguatan perencanaan, optimalisasi proses bisnis, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Penguatan perencanaan kinerja melalui penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya yang dilakukan untuk memastikan target kinerja tercapai secara terukur, realistis, dan relevan dengan kapasitas organisasi.
2. Peningkatan efisiensi dan kualitas program dengan menerapkan integrasi teknologi informasi, standardisasi prosedur kerja, dan pengendalian internal yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas, konsistensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengembangan SDM, pendampingan teknis, dan monitoring kinerja yang adaptif yang dilakukan untuk memperkuat kompetensi teknis dan manajerial ASN, sehingga mendukung pencapaian hasil program secara optimal.
4. Penguatan koordinasi dan kolaborasi bersama pemangku kepentingan melalui kemitraan kerja sama dengan pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk memperkuat dan memperluas sinergi dan dukungan lintas fungsi guna mendukung akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan

Lampiran

A. Perjanjian Kinerja Awal BGTK Provinsi Maluku



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala BGTK Provinsi Maluku
Dengan
Direktur Jenderal Guru, Tenaga
Kependidikan, dan Pendidikan Guru**

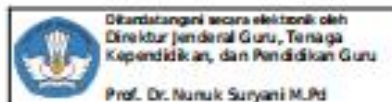
Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. La Mansur, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala BGTK Provinsi Maluku
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

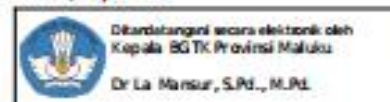
Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd
Jabatan : Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.



Ambon, 29 Juli 2025

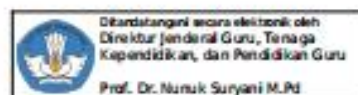


Catatan:
- UU ITE No 1 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik, dokumen Elektronik, dan data Elektronik yang mempunyai nilai hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1,63
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp18.669.131.000
2	7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp4.711.949.000
Total Anggaran			Rp23.381.080.000



Ambon, 29 Juli 2025



Catatan:
- UU No. 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi elektronik dapat di otentikasi dengan cara elektronik yang menghasilkan data bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR



B. Perjanjian Kinerja Revisi BGTK Provinsi Maluku



**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala BGTK Provinsi Maluku
Dengan
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr La Mansur, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala BGTK Provinsi Maluku
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd
Jabatan : Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Ambon, 10 Desember 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Guru, Tenaga
Kependidikan, dan Pendidikan Guru
Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd


Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BGTK Provinsi Maluku
Dr La Mansur, S.Pd., M.Pd.

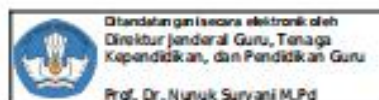


Catatan :
• UU ITE No.1 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik, data atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR

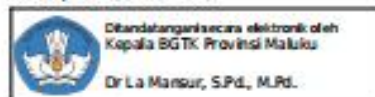


Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1,63
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp17.393.619.000
2	7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp5.356.026.000
Total Anggaran			Rp22.749.645.000



Ambon, 10 Desember 2025



Catatan :
- UU ITE No.1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik, dokumen Elektronik, dan atau hasil otaknya merupakan data bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.



C. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan										
[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1,63	-	-	-	1,63	-	-	-	1,66
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku										
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik	-	-	-	Sangat Baik	-	-	-	Sangat Baik
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A	Predikat	A	-	-	-	A	-	-	-	A

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒

Pernyataan		Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana strategis	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒

Pernyataan Telah Direviu
Balai Guru Penggerak dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku
Tahun Anggaran 2025

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 29 Januari 2026

Ketua Tim Reviu,



John S. Pattiruhu